AS SIYASAH
JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E ISSN: 2549-1865
Vol. 11 No. 1 Bulan Mei Tahun 2026
https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/index
Jurnalfisipuniska@gmail.com

PERAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DALAM MENANGANI MUSIBAH BANJIR DI WILAYAH MARTAPURA KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Widiati[1)*], **Vera Verlina**[2)]

[1)* 2)] Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Achmad Yani Banjarmasin, Banjarbaru, Indonesia
Email: widiatiw61@gmail.com
*Corresponding Author**

DOI : 10.31602/as.v11i1.23210
Riwayat Artikel :
Diterima : 10 – April – 2026
Disetujui : 28 – Mei – 2026
Diterbitkan : 30 – Mei – 2026
Hal : 105 – 117

Abstract

This study aims to analyze the role of the South Kalimantan National Disaster Management Agency (BNPB) in handling the flood disaster in the Martapura area of Banjar Regency. The study used a qualitative approach with a descriptive type, where data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants were determined purposively, including BNPB/BPBD, local governments, and flood-affected communities. Data analysis was conducted using an interactive model that includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the role of BNPB has covered all stages of disaster management, namely mitigation, preparedness, emergency response, and rehabilitation and reconstruction. In the emergency response stage, BNPB demonstrated relatively effective performance, particularly in coordinating evacuation and aid distribution. However, in the mitigation and preparedness stages, obstacles were still found, such as low public awareness, limited resources, and suboptimal policy implementation at the local level. Furthermore, in the rehabilitation and reconstruction stages, there were still obstacles in accelerating aid distribution and cross-sectoral coordination. These findings indicate a gap between national policy and implementation at the regional level. Therefore, strengthening coordination, increasing community capacity, and optimizing the use of technology are necessary to increase the effectiveness of sustainable flood disaster management.

Keywords: BNPB, flood, disaster management, governance, South Kalimantan, Martapura

This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright ***© 2026 by Journal As Siyasah***

PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan salah satu jenis bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan karakteristik geografis berupa wilayah kepulauan dengan curah hujan tinggi menjadikan banyak daerah rentan terhadap bencana banjir. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap banjir adalah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah Martapura, Kabupaten Banjar. Wilayah ini secara geografis berada pada kawasan dataran rendah dan dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura yang sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrologi dan perubahan penggunaan lahan. Kondisi ini menjadikan wilayah tersebut rawan mengalami banjir, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi.

Peristiwa banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 menjadi salah satu bencana terbesar dalam kurun waktu puluhan tahun terakhir. Banjir tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan, meluapnya sungai, serta faktor lingkungan seperti deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Selain faktor alam, aktivitas manusia

seperti eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan turut memperparah risiko banjir di wilayah ini. Di wilayah Martapura sendiri, banjir terjadi secara berulang akibat kombinasi antara faktor hidrologis dan antropogenik, seperti penyempitan sungai, pendangkalan, dan perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan. Dampak dari bencana banjir tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian ekonomi akibat banjir di wilayah Martapura mencapai miliaran rupiah, meliputi kerusakan infrastruktur, kehilangan pendapatan, serta kerugian material rumah tangga. Selain itu, banjir juga menyebabkan terganggunya aktivitas pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan risiko penyakit. Dalam konteks sosial, bencana banjir dapat menimbulkan kerentanan baru, seperti meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penanganan bencana banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam koordinasi, komando, dan pelaksanaan penanggulangan bencana. BNPB tidak hanya berperan dalam tahap tanggap darurat, tetapi juga dalam tahap mitigasi, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam kasus banjir di Kalimantan Selatan, BNPB turut berperan dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Peran ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respon darurat, tetapi juga pada upaya jangka panjang untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak.

Secara teoretis, penelitian ini didasarkan pada beberapa pendekatan utama dalam ilmu sosial dan politik, khususnya teori manajemen bencana, teori governance, dan teori kolaborasi antar lembaga. Teori manajemen bencana menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu siklus yang meliputi tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi (Coppola 2011). Dalam konteks ini, BNPB memiliki peran penting dalam mengelola seluruh tahapan tersebut secara sistematis dan terkoordinasi. Sementara itu, teori governance menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam penanganan bencana (Rhodes 1996). Penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat. Selain itu, teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008) juga relevan dalam menjelaskan bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, BNPB berperan sebagai koordinator yang mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya dalam penanganan bencana banjir. Teori ini menjadi penting karena kompleksitas bencana banjir tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, politik, dan ekonomi.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Penelitian oleh Muzdalifah et al. (2023) menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya BPBD, memiliki peran penting dalam efektivitas penanganan banjir, meskipun masih terdapat kendala dalam komunikasi dan distribusi sumber daya. Penelitian Nathaniel, Soeryamassoeka, and Yulianto (2023) menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dan konservasi

lingkungan sebagai strategi utama dalam mitigasi banjir. Sementara itu, Kadir, Sirang, and Badaruddin (2017) menekankan bahwa penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lingkungan dapat meningkatkan risiko banjir di DAS Martapura. Penelitian lain oleh Ilmi et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor manusia seperti alih fungsi lahan dan aktivitas pertambangan menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi banjir di Kabupaten Banjar. Selain itu, penelitian Erlia, Kumalawati, and Aristin (2018) menemukan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi banjir masih berada pada kategori sedang, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana. Penelitian Rahmah (2023) juga mengungkapkan bahwa dampak ekonomi banjir sangat signifikan dan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk mengurangi kerugian masyarakat .

Selain lima penelitian tersebut, terdapat penelitian lain yang relevan, seperti Angriani dan Kumalawati (2016) yang mengkaji pemetaan bahaya banjir di Kalimantan Selatan, Coppola (2011) yang membahas manajemen bencana secara komprehensif, serta Ansell and Gash (2008) yang menyoroti pentingnya kolaborasi dalam governance. Penelitian oleh Dahlberg (2011) juga memberikan perspektif mengenai peran teknologi dalam governance modern, yang dapat diaplikasikan dalam sistem informasi kebencanaan. Sementara itu, penelitian internasional oleh Kabir et al. (2020) menunjukkan pentingnya inovasi teknologi dalam prediksi banjir untuk meningkatkan respons bencana. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami fenomena banjir dan penanggulangannya, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis, lingkungan, atau kesiapsiagaan masyarakat. Penelitian yang secara khusus mengkaji peran BNPB sebagai aktor utama dalam penanganan bencana banjir, khususnya di tingkat daerah seperti Martapura, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif governance dan collaborative governance dalam menganalisis peran BNPB dalam penanganan bencana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang menitikberatkan pada peran BNPB sebagai institusi nasional dalam penanganan bencana di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga menganalisis aspek kelembagaan, koordinasi antar aktor, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam kajian ilmu sosial dan politik, khususnya dalam konteks governance bencana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan teori manajemen bencana, governance, dan collaborative governance dalam menganalisis peran BNPB. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada konteks lokal di wilayah Martapura yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah rawan banjir. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi kebijakan publik dan manajemen bencana.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat frekuensi dan intensitas bencana banjir yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Banjir tidak hanya menjadi permasalahan lingkungan, tetapi juga menjadi isu sosial dan politik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Peran BNPB sebagai lembaga utama dalam penanggulangan bencana perlu dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam menangani bencana, khususnya di daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi seperti Martapura. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih

efektif dan berkelanjutan dalam penanggulangan bencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan dalam menangani musibah banjir di wilayah Martapura Kabupaten Banjar. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk peran BNPB dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran tersebut, serta mengevaluasi koordinasi antara BNPB dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur mengenai peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani bencana banjir tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar manajemen bencana, governance, serta dinamika sosial yang melingkupi masyarakat terdampak. Bencana banjir sebagai fenomena hidrometeorologi telah menjadi isu global yang tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia, banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Coppola (2011) yang menyatakan bahwa bencana modern merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor alam dan kerentanan sosial manusia. Dalam kerangka teoritis, manajemen bencana dipahami sebagai suatu siklus yang meliputi tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Coppola (2011) menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengelola setiap tahapan tersebut secara efektif dan terintegrasi. BNPB sebagai lembaga nasional memiliki mandat untuk mengoordinasikan seluruh tahapan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, peran BNPB tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan sinergi antar lembaga dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Selain pendekatan manajemen bencana, teori governance juga menjadi landasan penting dalam memahami peran BNPB. Rhodes (1996) mendefinisikan governance sebagai proses interaksi antara berbagai aktor dalam sistem pemerintahan yang melibatkan jaringan, koordinasi, dan kolaborasi. Dalam penanggulangan bencana, governance menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara top-down semata, melainkan membutuhkan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Sejalan dengan itu, konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) memberikan perspektif yang lebih spesifik mengenai pentingnya kolaborasi antar aktor dalam pengambilan keputusan publik. Collaborative governance menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan, termasuk dalam penanggulangan bencana, sangat bergantung pada tingkat kepercayaan, komunikasi, dan komitmen antar aktor yang terlibat. Dalam konteks banjir di Kalimantan Selatan, kolaborasi antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas penanganan bencana.

Banjir di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Martapura, memiliki karakteristik yang unik karena dipengaruhi oleh kondisi geografis berupa dataran rendah dan keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Martapura. Penelitian Kadir et al. (2017) menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan di DAS Martapura telah meningkatkan risiko banjir secara signifikan. Aktivitas

seperti deforestasi, pertambangan, dan konversi lahan menjadi permukiman menyebabkan berkurangnya daya serap tanah terhadap air hujan, sehingga meningkatkan potensi banjir. Temuan ini diperkuat oleh Ilmi et al. (2022) yang menyatakan bahwa faktor antropogenik menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi banjir di wilayah tersebut. Selain faktor lingkungan, aspek sosial juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir. Menurut Blaikie et al. (2014), kerentanan sosial merupakan hasil dari kondisi ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam konteks Martapura, tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Penelitian Erlia et al. (2018) menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir masih berada pada kategori sedang, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui edukasi dan pelatihan.

Dalam aspek kelembagaan, efektivitas penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga. Penelitian Muzdalifah et al. (2023) menemukan bahwa meskipun koordinasi antara BPBD dan instansi terkait telah berjalan, masih terdapat kendala dalam hal komunikasi, distribusi bantuan, dan keterbatasan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa peran BNPB sebagai koordinator nasional masih perlu diperkuat, terutama dalam memastikan integrasi kebijakan antara pusat dan daerah. Lebih lanjut, penelitian Rosadi dan Kristanto (2024) menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebijakan publik dalam penanggulangan banjir. Mereka menyatakan bahwa strategi penanganan banjir harus mencakup aspek struktural, seperti pembangunan infrastruktur, serta aspek non-struktural, seperti regulasi dan edukasi masyarakat. Dalam hal ini, BNPB memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan dan sosial.

Dari sisi dampak ekonomi, banjir memiliki konsekuensi yang sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Rahmah (2023) menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat banjir di Martapura mencakup kerusakan rumah, kehilangan mata pencaharian, serta terganggunya aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada aspek penyelamatan jiwa, tetapi juga pada pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Dalam konteks ini, BNPB memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan peluang dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Dahlberg (2011) menyatakan bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam governance. Dalam penanggulangan bencana, teknologi seperti sistem peringatan dini, pemetaan risiko, dan platform informasi dapat membantu dalam mengurangi dampak bencana. Penelitian Kabir et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi prediksi banjir, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat dan tepat.

Meskipun demikian, implementasi teknologi dalam penanggulangan bencana masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Dalam hal ini, BNPB memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan pengembangan sistem informasi kebencanaan. Secara keseluruhan, kajian literatur ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana banjir merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, hingga

kelembagaan. Peran BNPB sebagai lembaga nasional menjadi sangat penting dalam memastikan koordinasi dan integrasi berbagai upaya penanggulangan bencana. Namun, efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola kolaborasi antar aktor, mengembangkan kebijakan yang adaptif, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dengan demikian, penelitian mengenai peran BNPB dalam menangani banjir di Martapura Kabupaten Banjar menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan politik, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan bencana di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis secara mendalam peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan dalam menangani musibah banjir di wilayah Martapura Kabupaten Banjar. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena sosial secara komprehensif, terutama terkait proses, interaksi, dan makna yang dibangun oleh aktor-aktor yang terlibat dalam penanggulangan bencana (Creswell 2014). Fokus penelitian diarahkan pada aspek kelembagaan, koordinasi, serta implementasi kebijakan dalam setiap tahapan manajemen bencana. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Rachman et al. 2024). Informan penelitian meliputi pejabat BNPB dan BPBD Kalimantan Selatan, aparat pemerintah daerah Kabupaten Banjar, serta masyarakat terdampak banjir di wilayah Martapura. Jumlah informan ditentukan secara fleksibel berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak memberikan temuan baru (Fiantika et al. 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran BNPB dalam tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan interaksi antar aktor, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan resmi, kebijakan, dan arsip terkait penanggulangan bencana. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh (Miles, Huberman, and Saldana 2013), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan penelitian (Creswell 2014). Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam dan komprehensif mengenai peran BNPB dalam penanganan banjir di wilayah Martapura

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan dalam menangani musibah banjir di wilayah Martapura Kabupaten Banjar menunjukkan dinamika yang kompleks, melibatkan berbagai aspek kelembagaan, koordinasi, serta implementasi kebijakan pada setiap tahapan manajemen bencana. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa BNPB memiliki peran strategis dalam empat tahapan utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, efektivitas pelaksanaan peran tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor koordinasi antar lembaga, kapasitas sumber daya, serta

partisipasi masyarakat. Pada tahap mitigasi, BNPB berperan dalam penyusunan kebijakan nasional serta memberikan arahan teknis kepada BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPB telah menginisiasi berbagai program mitigasi, seperti penyusunan peta risiko bencana, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini. Namun, implementasi di tingkat lokal masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir tanpa upaya adaptasi yang memadai.

Pada tahap kesiapsiagaan, BNPB berperan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat melalui pelatihan, simulasi bencana, serta penyediaan logistik darurat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat BPBD, diketahui bahwa BNPB secara rutin mengadakan pelatihan penanggulangan bencana bagi relawan dan aparat desa. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih bervariasi, tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman menghadapi bencana, serta akses terhadap informasi. Di beberapa wilayah, masyarakat sudah memiliki sistem gotong royong yang baik dalam menghadapi banjir, tetapi di wilayah lain masih terdapat ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah. Pada tahap tanggap darurat, peran BNPB terlihat paling dominan. BNPB bertindak sebagai koordinator utama dalam distribusi bantuan, evakuasi korban, serta penyediaan fasilitas darurat seperti posko pengungsian dan layanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons BNPB dalam penanganan banjir di Martapura tergolong cepat, terutama dalam mobilisasi bantuan logistik dan tenaga medis. Namun, terdapat beberapa kendala dalam koordinasi antar lembaga, seperti keterlambatan distribusi bantuan di beberapa titik serta tumpang tindih kewenangan antara BNPB dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem komando telah berjalan, masih diperlukan peningkatan dalam aspek koordinasi dan komunikasi.

Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, BNPB berperan dalam pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Program yang dilakukan meliputi bantuan perbaikan rumah, pemulihan infrastruktur, serta pemberian bantuan ekonomi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi telah memberikan dampak positif dalam mempercepat pemulihan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah dalam penentuan prioritas pembangunan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai temuan penelitian, berikut disajikan tabel hasil penelitian terkait peran BNPB dalam setiap tahapan penanggulangan bencana:

Tabel 1. Peran BNPB dalam Penanggulangan Banjir di Martapura

Tahapan Bencana	Peran BNPB	Temuan Lapangan	Kendala
Mitigasi	Penyusunan kebijakan, peta risiko, edukasi	Program sudah ada, namun belum merata	Kesadaran masyarakat rendah
Kesiapsiagaan	Pelatihan, simulasi, logistik	Pelatihan rutin, kesiapan bervariasi	Ketergantungan masyarakat
Tanggap Darurat	Evakuasi, distribusi bantuan	Respons cepat dan terkoordinasi	Distribusi belum merata
Rehabilitasi	Pemulihan ekonomi dan infrastruktur	Pemulihan berjalan bertahap	Keterlambatan dana

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis bahwa peran BNPB sudah

mencakup seluruh tahapan manajemen bencana sebagaimana dikemukakan dalam teori (Coppola 2011). Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek implementasi di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan realitas di lapangan. Dari perspektif governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana di Martapura melibatkan berbagai aktor, seperti BNPB, BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat. Kolaborasi antar aktor ini menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penanganan bencana. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antar aktor masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya tumpang tindih peran serta kurangnya komunikasi antar lembaga. Temuan ini sejalan dengan teori Rhodes (1996) yang menyatakan bahwa governance memerlukan koordinasi yang efektif antar aktor untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks collaborative governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi antar aktor masih berada pada tahap moderat. BNPB sebagai koordinator telah berupaya mengintegrasikan berbagai pihak, namun masih terdapat kendala dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama. Beberapa informan menyatakan bahwa perbedaan kepentingan antar lembaga sering kali menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi collaborative governance masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek komunikasi dan koordinasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penanggulangan bencana. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang tinggi cenderung lebih siap dalam menghadapi bencana. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih rentan terhadap dampak banjir. Hal ini sejalan dengan teori kerentanan sosial yang dikemukakan oleh Blaikie et al. (2014), yang menyatakan bahwa kerentanan masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Dari sisi ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat banjir, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Program bantuan ekonomi dari BNPB dinilai cukup membantu, namun belum mampu sepenuhnya mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat seperti sebelum bencana. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan strategi pemulihan ekonomi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana masih belum optimal. Meskipun BNPB telah mengembangkan sistem peringatan dini, namun pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta keterbatasan akses terhadap teknologi. Padahal, teknologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, sebagaimana dikemukakan oleh (Kabir et al. 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BNPB dalam menangani banjir di Martapura sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek, seperti koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan penanggulangan bencana di masa depan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan publik, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Selain itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya di wilayah yang rawan banjir seperti Martapura Kabupaten Banjar.

Hasil penelitian mengenai peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan dalam menangani musibah banjir di wilayah Martapura Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik. Dalam konteks ini, BNPB memainkan peran strategis sebagai koordinator utama dalam seluruh tahapan manajemen bencana, mulai dari mitigasi hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kapasitas kelembagaan, koordinasi antar aktor, serta partisipasi masyarakat. Dalam perspektif teori manajemen bencana, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BNPB telah mencakup seluruh tahapan dalam siklus manajemen bencana sebagaimana dikemukakan oleh Coppola (2011), yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap mitigasi, BNPB telah berupaya melakukan berbagai langkah preventif, seperti penyusunan peta risiko bencana dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi mitigasi di tingkat lokal masih belum optimal. Hal ini dapat dijelaskan melalui konsep risk perception, di mana masyarakat yang sering mengalami banjir cenderung menganggap bencana sebagai hal yang biasa sehingga mengurangi kesadaran untuk melakukan upaya mitigasi (Blaikie et al. 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan.

Pada tahap kesiapsiagaan, penelitian ini menemukan bahwa BNPB telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, seperti pelatihan dan simulasi bencana. Namun, tingkat kesiapsiagaan masyarakat masih bervariasi. Hal ini sejalan dengan temuan Erlia et al. (2018) yang menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan banjir masih berada pada kategori sedang. Variasi ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, serta akses terhadap informasi. Dalam konteks ini, teori capacity building menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya bergantung pada pelatihan formal, tetapi juga pada proses pembelajaran sosial yang terjadi dalam masyarakat (Creswell 2014). Oleh karena itu, BNPB perlu mengembangkan pendekatan yang lebih partisipatif dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pada tahap tanggap darurat, hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPB memiliki peran yang paling dominan dan relatif efektif. Respons cepat dalam distribusi bantuan dan evakuasi korban menunjukkan bahwa sistem komando yang diterapkan oleh BNPB telah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan konsep incident command system dalam manajemen bencana yang menekankan pentingnya koordinasi dan kejelasan struktur komando dalam situasi darurat (Coppola 2011). Namun, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kendala dalam distribusi bantuan yang belum merata. Hal ini dapat dijelaskan melalui teori governance yang dikemukakan oleh (Rhodes 1996), yang menyatakan bahwa kompleksitas jaringan

aktor dalam pemerintahan dapat menyebabkan hambatan dalam koordinasi dan implementasi kebijakan.

Dalam konteks collaborative governance, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat masih belum optimal. Meskipun terdapat upaya koordinasi, namun masih ditemukan tumpang tindih kewenangan serta kurangnya komunikasi antar lembaga. Temuan ini sejalan dengan (Ansell and Gash 2008) yang menyatakan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat bergantung pada tingkat kepercayaan, komunikasi, dan komitmen antar aktor. Kurangnya kepercayaan antar lembaga dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, BNPB perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan membangun kepercayaan antar aktor melalui komunikasi yang lebih intensif dan transparan. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, penelitian ini menunjukkan bahwa BNPB telah berperan dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Program bantuan perbaikan rumah dan pemulihan infrastruktur telah memberikan dampak positif, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti keterlambatan pencairan dana. Hal ini menunjukkan bahwa proses birokrasi masih menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep implementation gap, yaitu kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan pelaksanaannya di lapangan (Pressman and Wildavsky 1984). Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi yang dapat mempercepat proses implementasi kebijakan.

Selain aspek kelembagaan, hasil penelitian ini juga menyoroti pentingnya faktor sosial dalam penanggulangan bencana. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi dengan risiko banjir. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana. Hal ini sejalan dengan teori kerentanan sosial yang dikemukakan oleh Blaikie et al. (2014), yang menyatakan bahwa kerentanan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penanggulangan bencana tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dari sisi ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa banjir memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, terutama di sektor informal. Program bantuan ekonomi dari BNPB dinilai cukup membantu, namun belum mampu sepenuhnya mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, teori pembangunan berkelanjutan menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa pemulihan ekonomi harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial agar tidak meningkatkan risiko bencana di masa depan (Coppola 2011).

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana masih belum optimal. Meskipun BNPB telah mengembangkan sistem peringatan dini, namun pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi digital serta keterbatasan infrastruktur. Dahlberg (2011) menyatakan bahwa teknologi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam governance. Dalam konteks penanggulangan bencana, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi serta mempercepat respons terhadap bencana. Penelitian Kabir et al. (2020) juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan dapat

meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini. Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal. BNPB sebagai lembaga nasional telah memiliki berbagai kebijakan dan program yang komprehensif, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam penanggulangan bencana masih belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif governance, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep multi-level governance, di mana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan (Rhodes 1996). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah serta peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BNPB dalam menangani banjir di Martapura sudah mencakup seluruh aspek manajemen bencana, namun masih perlu ditingkatkan dalam beberapa aspek, seperti koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar aktor serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana. Selain itu, diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial dan politik, khususnya dalam kajian governance dan manajemen bencana. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Dengan memperbaiki berbagai kelemahan yang ada, diharapkan penanggulangan bencana di masa depan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kalimantan Selatan dalam menangani musibah banjir di wilayah Martapura Kabupaten Banjar telah mencakup seluruh tahapan manajemen bencana, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap tanggap darurat, peran BNPB terlihat paling dominan dan relatif efektif, terutama dalam hal koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun demikian, pada tahap mitigasi dan kesiapsiagaan masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun program pemulihan telah berjalan, masih terdapat hambatan dalam aspek koordinasi dan percepatan realisasi bantuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat daerah, sehingga memerlukan penguatan dalam sistem governance dan koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar BNPB bersama pemerintah daerah meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana melalui penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal. Selain itu, diperlukan upaya intensif dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi kebencanaan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem peringatan dini dan informasi kebencanaan berbasis digital, juga perlu

dioptimalkan untuk mendukung respons yang lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, pemerintah perlu mempercepat proses birokrasi dalam penyaluran bantuan pascabencana agar pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, penanggulangan bencana banjir di masa depan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ansell, Chris, and Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4):543–71. doi:10.1093/jopart/mum032.

Blaikie, Piers, Terry Cannon, Ian Davis, and Ben Wisner. 2014. *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*. 2nd ed. London: Routledge.

Coppola, Damon P. 2011. *Introduction to International Disaster Management*. Butterworth-Heinemann.

Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.

Dahlberg, Lincoln. 2011. "Re-Constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions.'" *New Media & Society* 13(6):855–72. doi:10.1177/1461444810389569.

Erlia, Devi, Rosalina Kumalawati, and Nevy Farista Aristin. 2018. "ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH MENGHADAPI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR." *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 4(6). doi:10.20527/jpg.v4i6.4709.

Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, and Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Ilmi, Bahrul, Nasruddin Nasruddin, Rosalina Kumalawati, and Selamat Riadi. 2022. "Penanganan Banjir Pada Permukiman Padat Penduduk Sepanjang Sub DAS Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)* 3(2):92–101. doi:10.20527/jgp.v3i2.6917.

Kabir, Syed, Sandhya Patidar, Xilin Xia, Qiuhua Liang, Jeffrey Neal, and Gareth Pender. 2020. "A Deep Convolutional Neural Network Model for Rapid Prediction of Fluvial Flood Inundation." *Journal of Hydrology* 590:125481. doi:10.1016/j.jhydrol.2020.125481.

Kadir, Syarifuddin, Karta Sirang, and Badaruddin Badaruddin. 2017. "PENGENDALIAN BANJIR BERDASARKAN KELAS KEMAMPUAN LAHAN DI SUB DAS MARTAPURA KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal Hutan Tropis* 4(3):254–64. doi:10.20527/jht.v4i3.3619.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2013. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.

Muzdalifah, Safa, Sandra Bhakti Mafriana, Andi Tenri Sompa, and Muhammad Kamil Attijani. 2023. "EFEKTIFITAS KOORDINASI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PROVINSI DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*

8(2):238–49. doi:10.33506/jn.v8i2.1898.

Nathaniel, Yose Gerard, Sb Soeryamassoeka, and Eko Yulianto. 2023. "FLOOD MANAGEMENT STRATEGY IN THE SINGKAWANG CITY USING SWOT ANALYSIS." *Jurnal Teknik Sipil* 23(4):511–20. doi:10.26418/jts.v23i4.68830.

Pressman, Jeffrey L., and Aaron Wildavsky. 1984. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation*. University of California Press.

Rachman, Arif, Elisha Yochanan, Andi Samanlangi, and Hery Purnomo. 2024. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*.

Rahmah, Azkia. 2023. "Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Banjir Di Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan." http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/122895.

Rhodes, R. A. W. 1996. "The New Governance: Governing without Government - R. A. W. Rhodes, 1996." *Sage Journals*. https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x.